



DAMPAK PENDUDUKAN JEPANG DI INDONESIA

HERDIANA, S.Pd., M.Pd.

Dampak Pendudukan Jepang dalam Kehidupan Politik, Ekonomi, dan Sosial-Budaya Bangsa Indonesia

1. Bidang Politik

Pendudukan Jepang membawa dampak yang sangat luas dalam kehidupan politik, ekonomi, dan sosial-budaya bangsa Indonesia. Dalam bidang politik, Jepang membubarkan semua kegiatan kemasyarakatan dan menggantinya dengan organisasi-organisasi bentukan Jepang. Jepang juga mengawasi secara ketat gerak-gerik para tokoh pergerakan.

2. Bidang Ekonomi

Dalam bidang ekonomi, Jepang mengendalikan sepenuhnya segala aktivitas perekonomian. Terjadi eksploitasi segala sumber daya demi kepentingan perang. Produksi pangan terutama beras merosot karena banyak tenaga kerja usia produktif diharuskan ikut *romusha*. Kemiskinan merebak di mana-mana.



3. Bidang Sosial

- Dalam bidang sosial, pemerintah Jepang merekrut perempuan dari berbagai negara Asia (sekitar 200.000 ribu perempuan), seperti Indonesia, Korea, dan Cina untuk dijadikan perempuan penghibur.
- Pada masa pendudukan Jepang kondisi pendidikan di tanah air berlangsung lebih buruk dibandingkan dengan masa pemerintahan Hindia-Belanda. Jumlah sekolah menurun drastis; beberapa kegiatan pendidikan di perguruan tinggi sempat terhenti untuk beberapa tahun. Sistem pembelajaran dan kurikulum sekolah ditujukan bagi kepentingan perang. Jepang terlebih dahulu mengindoktrinasi para calon guru dengan kepentingan mereka. Krisis dalam bidang pendidikan diperparah oleh kenyataan bahwa banyak guru dipekerjakan sebagai pejabat pada pemerintahan Jepang sehingga yang mengakibatkan kemunduran mutu pendidikan.



4. Bidang Kebudayaan

- Pengaruh Jepang di bidang kebudayaan lebih banyak dalam lagu-lagu, film, drama yang seringkali dipakai untuk propaganda. Banyak lagu Indonesia diangkat dari lagu Jepang yang populer pada zaman Jepang.
- Pemerintah Jepang juga mendirikan sebuah pusat kebudayaan yang diberi nama ***Keimin Bunkei Shidoso***. Pusat kebudayaan tersebut menjadi wadah bagi perkembangan kesenian bangsa Indonesia. Akan tetapi, lembaga ini dikontrol sedemikian rupa sehingga tidak menyimpang dari kepentingan Jepang.
- Buku-buku dan karya-karya sastra yang sejalan dengan propaganda dibiarkan berkembang. Sebaliknya, karya-karya sastra yang dianggap bertentangan dengan kepentingan Jepang dilarang beredar dan penulisnya dipenjarakan.
- Pada zaman Jepang, tidak ada pers yang independen; semuanya berada di bawah pengawasan Jepang.



Perjuangan Meraih Kemerdekaan pada Masa Pendudukan Jepang

- Rakyat Indonesia merasakan bahwa pendudukan Jepang tidak berbeda dengan penjajahan Hindia-Belanda. rakyat Indonesia tetap menderita dan miskin.
- Oleh karena itu, muncul berbagai perlawanan dari rakyat Indonesia.
- Berbagai macam bentuk perlawanan yang muncul ada yang dilakukan dengan cara kooperatif, melalui gerakan bawah tanah, dan mengangkat senjata secara terbuka.

1. Perjuangan dengan Cara Kooperatif (Kerja Sama)

- Perjuangan secara kooperatif dilakukan oleh tokoh-tokoh nasionalis yang duduk lembaga-lembaga penting bentukan Jepang. Melalui lembaga-lembaga ini, mereka menggalang persatuan untuk meraih kemerdekaan.



2. Perjuangan Melalui Gerakan Bawah Tanah

- Perjuangan bawah tanah adalah perjuangan yang dilakukan secara tertutup dan rahasia. Perjuangan ini umumnya dilakukan oleh bangsa Indonesia yang bekerja pada instansi-instansi pemerintahan Jepang.
- Tokoh-tokoh yang melakukan gerakan bawah tanah di antaranya adalah kelompok Soekarni, kelompok Achmad Soebardjo, dan kelompok Sutan Sjahrir.

a. Kelompok Soekarni

- Soekarni menghimpun tokoh-tokoh pergerakan, seperti Adam Malik, Kusnaeni, Pandu Wiguna, dan Maruto Nitimiharjo. Bersama tokoh-tokoh itu, Soekarni menggembleng para pemuda untuk berjuang demi kemerdekaan Indonesia, menyebarkan cita-cita kemerdekaan, menghimpun orang-orang yang berjiwa revolusioner, serta mengungkapkan kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh Jepang.



b. Kelompok Achmad Soebardjo

- Achmad Soebardjo berusaha menghimpun tokoh-tokoh bangsa Indonesia yang bekerja dalam Angkatan Laut Jepang dan mendirikan asrama pemuda yang bernama “Asrama Indonesia Merdeka”. Di tempat itu, mereka memberikan pelajaran-pelajaran guna menanamkan semangat nasionalisme di kalangan pemuda Indonesia.

c. Kelompok Sutan Sjahrir

- Sementara Soekarno dan Hatta menjalin kerja sama dengan Jepang, Sjahrir membangun jaringan gerakan bawah tanah anti-fasis. Sjahrir yakin Jepang tak mungkin memenangkan perang. Oleh karena itu, menurutnya, kaum pergerakan mesti menyiapkan diri untuk merebut kemerdekaan di saat yang tepat.

d. Kelompok Pemuda

- Di Jakarta, terdapat dua kelompok pemuda yang aktif berjuang, yakni yang terhimpun dalam asrama Ika Daikagu (Sekolah Tinggi Kedokteran) dan kelompok pemuda yang terhimpun dalam Badan Permusyawaratan/Perwakilan Pelajar Indonesia (Baperpri). Kelompok terpelajar tersebut mempunyai ikatan organisasi yang bernama Persatuan Mahasiswa.



3. Perlawanan Bersenjata

a. Perlawanan Rakyat Desa Sukamanah di Tasikmalaya

- Perlawanan rakyat di Tasikmalaya ini diawali oleh adanya penolakan santri-santri Pondok Pesantren Sukamanah Singaparna pimpinan K.H. Zaenal Mustafa untuk melakukan seikerei—memberi penghormatan kepada Kaisar Jepang dengan cara membungkukkan badan dalam dalam ke arah bendera Jepang yang berlambang matahari terbit.
- Kewajiban Seikerei ini jelas menyinggung perasaan umat Islam Indonesia karena termasuk perbuatan syirik, yaitu menyekutukan Tuhan. Selain

b. Perlawanan Rakyat Indramayu

- Peristiwa Indramayu terjadi bulan April 1944 disebabkan adanya kewajiban menyetorkan sebagian hasil padi dan pelaksanaan kerja rodi/kerja paksa atau romusha yang telah mengakibatkan penderitaan rakyat yang berkepanjangan.



c. Perlawanan Rakyat Aceh

- Di bawah pimpinan seorang guru mengaji bernama Tengku Abdul Jalil, rakyat Aceh melakukan perlawanan terhadap tentara Jepang di Cot Plieng. Perlawanan yang terjadi pada 10 November 1942 berawal dari tindakan yang sewenang-wenang yang dilakukan oleh pemerintah pendudukan Jepang.

d. Perlawanan Peta di Blitar

- Pembela Tanah Air (Peta), sebuah organisasi militer bentukan Jepang ini, melakukan perlawanan karena sudah tidak tahan lagi melihat penderitaan rakyat yang berada di wilayahnya. Perlawanan ini disebabkan karena persoalan pengumpulan padi, romusha dan Heiho yang dilakukan secara paksa dan di luar batas perikemanusiaan. Sebagai putera rakyat, para pejuang tidak tega melihat penderitaan rakyat. Alasan lainnya, para pelatih militer Jepang bersikap angkuh dan merendahkan prajurit-prajurit Indonesia.



Akhir Pendudukan Jepang di Indonesia

1. Janji Kemerdekaan dan BPUPKI

Menjelang akhir 1944, posisi Jepang terdesak oleh Sekutu. Dalam kondisi ini, Jepang mengulang kembali janjinya memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Letnan Jenderal Kumakici Harada sebagai panglima tentara Jepang di Jawa mengumumkan dibentuknya Dokuritsu Junbi Coosakai (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, disingkat BPUPKI). Badan ini bertugas menyelidiki berbagai hal terkait dengan aspek politik, ekonomi, pemerintahan, dan hal-hal lain yang diperlukan bagi pembentukan sebuah negara merdeka.



BPUPKI melakukan sidang pertama dari 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Hasil utama sidang ini adalah sebuah rumusan yang menjadi dasar negara. Ir. Soekarno mengemukakan lima rumusan dasar negara, yaitu:

1. kebangsaan Indonesia
2. internasionalisme atau perikemanusiaan
3. mufakat atau demokrasi
4. kesejahteraan sosial
5. ketuhanan Yang Maha Esa

Rumusan ini kemudian diberi nama Pancasila.



Sampai sidang berakhir belum diperoleh kata sepakat untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara. Oleh karena itu, BPUPKI membentuk panitia kecil. Karena anggotanya hanya 9 orang, maka disebut sebagai **Panitia Sembilan**. Tugasnya adalah menyelesaikan rumusan dasar negara serta tujuan dan asas yang akan digunakan oleh negara Indonesia yang akan lahir. Rumusan dasar negara yang tercantum di dalam Piagam Jakarta, yang tersusun dari hasil musyawarah dan mufakat tersebut adalah sebagai berikut.

1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.



Dalam sidang kedua ini, selain dasar negara, BPUPKI juga mengagendakan bentuk negara dan batas wilayah negara. Dalam sidang ini BPUPKI juga membentuk tiga panitia, yang terdiri dari panitia hukum dasar, panitia masalah ekonomi, dan panitia masalah bela negara.

Selanjutnya, pada 14 Juli 1945, selaku ketua panitia hukum dasar, Ir. Soekarno mengajukan rancangan isi dari hukum dasar tersebut yang terdiri atas tiga bagian yang meliputi:

- 1) pernyataan Indonesia merdeka,
- 2) pembukaan Undang-Undang Dasar,
- 3) batang tubuh undang-undang dasar.



BPUPKI dibubarkan pada 7 Agustus 1945 dan digantikan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Marsekal Terauchi kemudian mengundang tiga tokoh pergerakan nasional, yaitu Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta dan dr. Radjiman Wedyodiningrat untuk datang ke markas pusat Jepang di Asia Tenggara, yaitu di Dalat, Vietnam Selatan. Dalam pertemuan itu, penguasa tertinggi Jepang mengatakan akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia pada 24 Agustus 1945.

2. Proklamasi Kemerdekaan

Sekembalinya tokoh-tokoh ini dari Dalat, diperoleh informasi bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Bangsa Indonesia kemudian memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, tujuh hari lebih maju dari tanggal yang dijanjikan Jepang. Hal ini sekaligus menjadi bukti bahwa kemerdekaan yang dicapai bangsa Indonesia murni perjuangan bangsa sendiri, dan bukan pemberian Jepang.



Pengaruh Jepang yang Masih Terasa Hingga Kini

1. Bidang Sosial-budaya

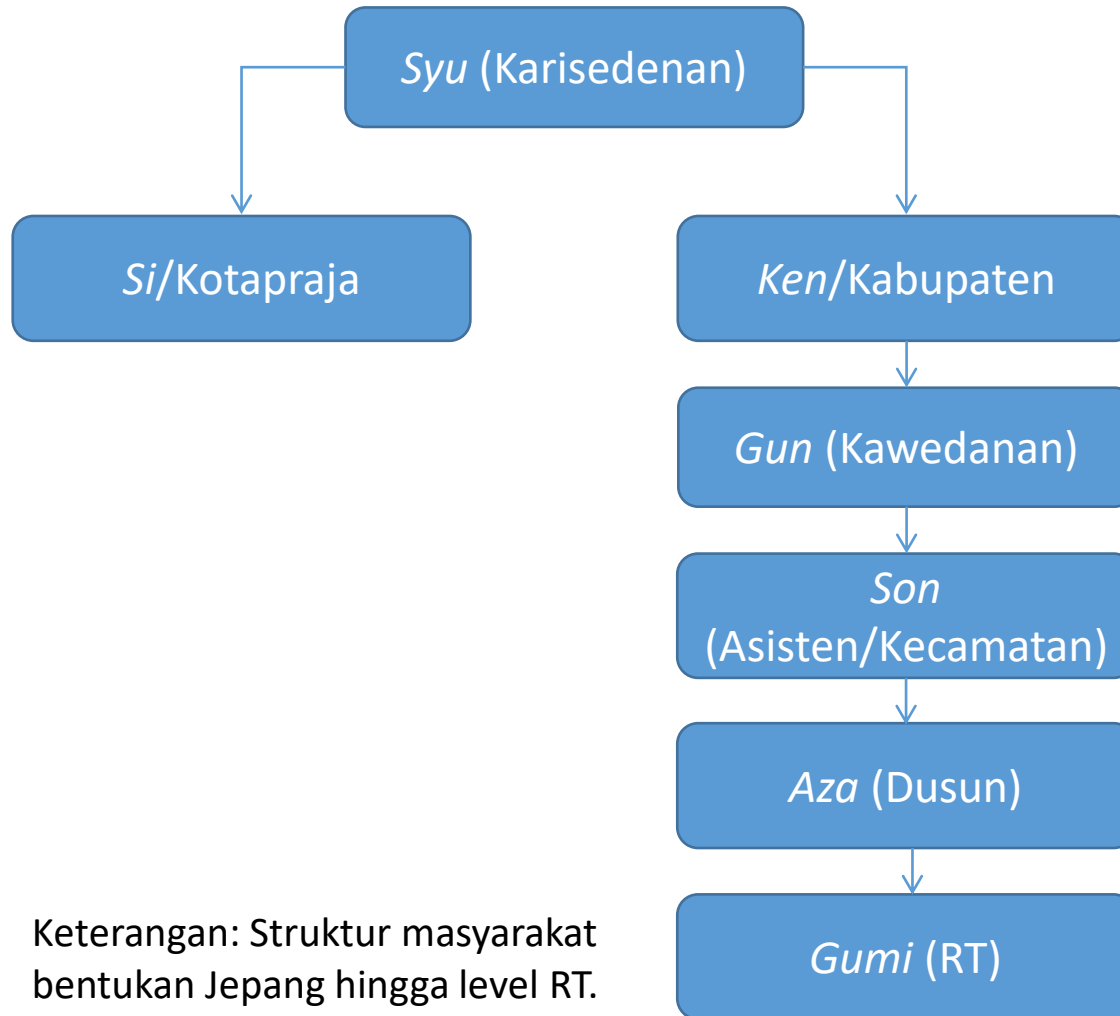
Dalam bidang sosial-budaya, pengaruh Jepang yang terasa hingga kini tampak dalam struktur masyarakat, bahasa, kesenian, dan pendidikan.

Struktur masyarakat

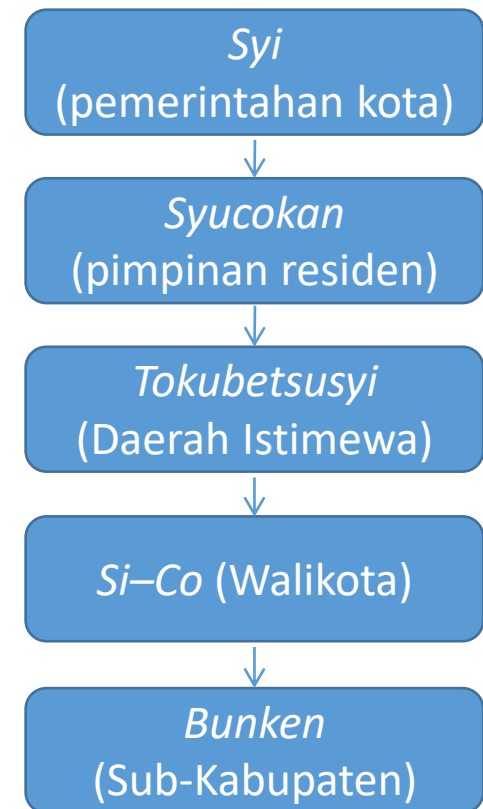
- Pada zaman pemerintahan kolonial Belanda, Indonesia hanya mengenal desa (atau dukuh) selaku unit pemerintahan terkecil.
- Pendudukan Jepang, struktur terkecil Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT).
- Tujuan pembentukan RT dan RW adalah memudahkan administrasi dan pengawasan.



Daerah



Kota



Keterangan: Struktur masyarakat bentukan Jepang hingga level RT.



Bahasa

- Pada 1943 Jepang mengizinkan berdirinya Komisi Penyempurnaan Bahasa Indonesia yang pada akhirnya berhasil memodifikasi 7.000 istilah bahasa Indonesia modern pada saat itu. Dengan demikian, sejak Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, pemerintahan kolonial Jepang memainkan peran yang penting bagi perkembangan bahasa Indonesia.

Kesenian

- Jepang mendirikan Keimin Bunka Shidosho (Pusat Kebudayaan) pada 1 April 1943 di Jakarta. Fungsi lembaga ini mewadahi aktivitas budayawan Indonesia agar tidak menyimpang dari tujuan Jepang. Tanggal 29 Agustus 1942, lembaga ini mengadakan pameran karya pelukis lokal Indonesia, seperti Basuki Abdoellah, Agus Djajasoeminta, Otto Djaja Soetara, Kartono Joedokoesoemo, dan Emiria Soenassa.
- Pada Agustus 1943, Jepang membentuk Persatuan Aktris Film Indonesia (Persafi).



Pendidikan

- Jepang menghilangkan diskriminasi di bidang pendidikan sebagaimana dipraktikkan pada masa kolonial Belanda. Pada masa pemerintahan Jepang, rakyat dari lapisan manapun berhak untuk mengenyam pendidikan formal. Jepang menerapkan sistem pendidikan formal seperti di negaranya, yaitu SD 6 tahun, SMP 3 tahun, dan SMA 3 tahun. Sistem ini masih diterapkan oleh pemerintah Indonesia sampai saat ini.

2. Bidang Militer

Jepang ikut membantu membangun semangat nasionalisme di kalangan kaum muda Indonesia melalui latihan-latihan militer yang mereka lakukan. Proses pembentukan dan pembangunan semangat nasionalisme itu dibentuk melalui pembentukan organisasi semi-militer dan organisasi militer sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Proses itu sebetulnya dirancang untuk kepentingan perang Jepang. Akan tetapi, efek sampingnya justru menguntungkan bagi Indonesia terutama dalam proses persiapan kemerdekaannya dan bahkan terus dipraktikkan sampai sekarang.



TERIMA KASIH

